

# Paradigma Baru Manajemen Pendidikan

Prof. Dr. Indra Bastian, MBA  
Olivia Idrus, SE., M.Sc



## PENDAHULUAN

---

Modul ini akan mengkerangkai pemikiran mahasiswa mengenai Paradigma Baru Manajemen Pendidikan. Modul ini terdiri dari 3 kegiatan belajar, yaitu:

1. Kegiatan Belajar I Ideologi dalam Pendidikan  
Dalam kegiatan belajar I ini akan dibahas mengenai hakekat ideologi, aspek ideologi dan empiris pendidikan yang berkembang selama ini, dan ideologi pendidikan dan kurikulum sekolah.
2. Kegiatan Belajar II Kerangka Sistem Pendidikan dan Desentralisasi Pendidikan.  
Dalam kegiatan belajar II ini akan dibahas mengenai kerangka sistem pendidikan, pengertian desentralisasi, dan tipologi desentralisasi pendidikan.
3. Kegiatan Belajar III Manajemen Pendidikan di Indonesia.  
Dalam kegiatan belajar III ini akan dibahas mengenai arah pandangan pendidikan Indonesia, ideologi pendidikan Indonesia, realita pendidikan di Indonesia, implikasi hasil pembangunan terhadap sektor pendidikan, perubahan paradigma pendidikan Indonesia: desentralisasi pendidikan, dan perubahan paradigma manajemen keuangan pendidikan.

### **Tujuan Instruksional Umum**

Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan konsep paradigma baru manajemen pendidikan.

**Tujuan Instruksional Khusus**

Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan tentang:

1. ideologi dalam pendidikan,
2. kerangka sistem pendidikan,
3. desentralisasi pendidikan, dan
4. manajemen pendidikan Indonesia.

**KEGIATAN BELAJAR 1****Ideologi dalam Pendidikan****A. HAKEKAT IDEOLOGI**

Tidak ada bidang usaha manusia yang bisa bersikap netral atau bebas nilai karena selalu didukung oleh nilai-nilai dan keyakinan, baik sadar maupun bawah sadar, dari pendukungnya, seperti keyakinan atau pandangan dunia adalah contoh dari apa yang pakar sosiologi sebut sebagai ideologi.

Ideologi didefinisikan sebagai satu aturan yang bertautan luas antara ide-ide dan keyakinan tentang dunia yang diselenggarakan oleh sekelompok orang yang menunjukkan perilaku dan percakapan ke berbagai orang atau masyarakat. Sistem kepercayaan ini biasanya dilihat sebagai "cara atau hal yang benar" oleh kelompok di antara mereka, dan mereka menjadi cara untuk memahami dunia (Meighan et al 2007: 212). Oleh karena itu, penting untuk memahami ideologi politik yang mendukung pandangan dunia saat ini dan menyederhanakan beberapa fitur kunci dari ideologi neoliberal dan neo-konservatif (Heywood dan Goodwin, 2007).

**B. ASPEK IDEOLOGI DAN EMPIRIS PENDIDIKAN YANG BERKEMBANG SAAT INI**

Pengelolaan pendidikan dipengaruhi oleh adanya implikasi globalisasi. Globalisasi dunia ini akan mempengaruhi pergeseran paradigma dan ideologi dalam bidang pendidikan. Dalam arti yang sangat praktis, penggunaan istilah ideologi dapat berguna untuk memisahkan berbagai konsep dari sekian banyak konsep yang terkait. Kata *ideologi pendidikan* sebenarnya erat kaitannya dengan kata *filosofi pendidikan*. Dalam makna yang lebih mendasar, istilah *filosofi pendidikan* menangkap perbedaan dalam pendekatan mendasar secara lebih tajam. Istilah *ideologi* terasa tidak terlalu akademis serta kurang abstrak dibandingkan dengan *filosofi*, yang disiratkan bukan sebagai sebuah kata pengetahuan mendalam, melainkan suatu pola gagasan yang lebih khusus dan dinamis, yang berfungsi sebagai pengaruh tindakan sosial.

Ideologi pada umumnya berkonotasi ketidakberubahan. Hal ini terjadi karena ideologi didasarkan pada keyakinan pokok yang mencakup tentang makna khusus kenyataan. Keyakinan ini cenderung untuk menjadi lebih kaku ketimbang keyakinan yang didasarkan pada perkiraan umum tentang hakikat kenyataan di tingkat abstraksi yang tinggi. Ideologi pendidikan terkait dengan sistem filosofis dalam empat hal berikut ini:

1. Merupakan sistem gagasan yang umum atau luas ketimbang kebanyakan filosofi.
2. Mengakar pada etika sosial (yakni dalam filosofi moral serta politik), dan hanya memiliki akar yang tidak besar di dalam sistem filosofi yang lebih abstrak, seperti misalnya realisme, idealisme, dan pragmatisme.
3. Mengarahkan tindakan sosial dan bukan sekadar menjernihkan ataupun menata pengetahuan
4. Merupakan sebab sekaligus akibat dari perubahan sosial yang mendasar.

Dalam hal ini, perlu diingat bahwa tidak satupun ideologi pendidikan tersebut yang bersifat tunggal atau monolitik. Terdapat enam ideologi pendidikan dasar yang dikenal, yaitu tiga ideologi Konservatif (Fundamentalisme Pendidikan, Intelektualisme Pendidikan, dan Konservatisme Pendidikan), dan tiga ideologi Liberalisme (Liberalisme Pendidikan, Liberasionisme Pendidikan, dan Anarkisme Pendidikan). Ideologi pendidikan ini terutama terdiri dari penerapan dan implikasi dari berbagai posisi moral dan politis yang menggarisbawahi perilaku per sekolah (Mansour Faqih dalam William F O'neil, 2001, hal: 99).

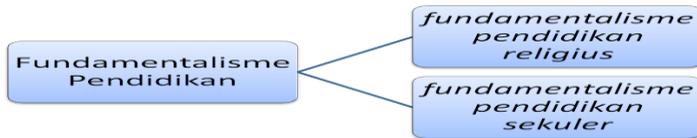
Menurut Mansour Faqih dalam William F O'neil, 2001, hal: 99-112, ada dua kelompok besar ideologi pendidikan, yaitu:

### **1. Ideologi Konservatif**

Paradigma ini dibangun berdasarkan keyakinan bahwa masyarakat pada dasarnya tidak bisa merencanakan perubahan atau mempengaruhi perubahan sosial, hanya Tuhan-lah yang merencanakan keadaan masyarakat dan hanya Dia yang tahu makna dibalik itu semua. Pada perkembangan selanjutnya, kaum konservatif sangat melihat pentingnya harmoni dalam masyarakat dan menghindari konflik dan kontradiksi.

Ideologi-ideologi pendidikan konservatif terdiri dari tiga tradisi pokok yang terentang dari ungkapan religius dari fundamentalisme pendidikan ke ujung terjauh yang paling kurang konservatif, ketiganya adalah sebagai berikut:

### a. *Fundamentalisme Pendidikan*



Ada dua macam variasi dari sudut pandang ini, yakni (1) *fundamentalisme pendidikan religius* yang nampak dalam pendidikan di bawah agama tertentu seperti di gereja atau di pesantren, yang memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap sesuatu yang diajarkan di dalam kitab sucinya; dan (2) *fundamentalisme pendidikan sekuler* yang bercirikan untuk mengembangkan komitmen terhadap cara pandang dunia melalui “akal sehat” yang disepakati, contohnya fundamentalisme pendidikan *populistik* yang sangat menekankan pada nasionalisme dan patriotisme.

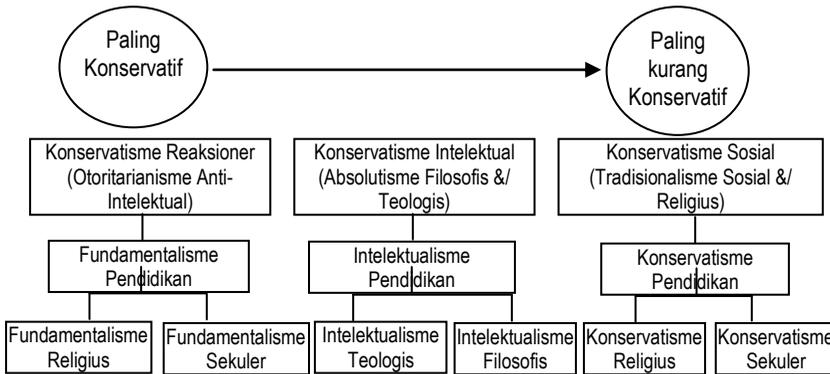
### b. *Intelektualisme Pendidikan*

Tradisi ini lahir dari ungkapan konservatisme politik yang didasarkan pada sistem-sistem pemikiran filosofis atau religius yang pada dasarnya otoritarian. Pemikiran ini ingin mengubah praktek politik yang ada, demi menyesuaikan secara lebih sempurna dengan cita-cita intelektual atau rohaniah yang sudah mapan dan tidak bervariasi. Terdapat dua variasi di dalamnya, yaitu *intelektualisme filosofis* yang bersifat sekuler, dan *intelektualisme teologis* yang mempunyai orientasi filosofi agama.

### c. *Konservatisme Pendidikan*

Pada dasarnya, konservatisme merupakan posisi yang mendukung ketaatan terhadap organisasi pelayanan pendidikan dan proses-proses budaya yang sudah teruji lama dan mapan, diikuti dengan rasa hormat yang mendalam terhadap hukum dan tatanan, sebagai landasan perubahan sosial yang konstruktif. Di dalam dunia pendidikan, seorang konservatif beranggapan bahwa sasaran utama sekolah adalah pelestarian dan penerusan pola sosial yang telah ada serta tradisi yang sudah mapan. Terdapat dua ungkapan dasar dalam hal ini, yaitu (1) *konservatisme pendidikan religius* yang menekankan peran sentral pelatihan rohaniah sebagai landasan pembangunan karakter moral yang tepat, dan, (2) *konservatisme pendidikan sekuler* yang memusatkan perhatian pada melestarikan dan meneruskan keyakinan dan praktek yang sudah ada, untuk menjamin pertahanan hidup

secara sosial serta efektifitas orientasi pendidikan yang bersifat religius, dimana, secara teologis, jelas kurang liberal jika dibandingkan dengan berbagai agama.



Sumber : Mansour Faqih dalam William F O'neil, 2001, hal: 107-109

Gambar 1.1  
Perspektif dalam Ideologi Pendidikan Konservatif

Terdapat 2 implikasi penerapan ideologi konservatif, yaitu:

- a. Pada pengelola satuan teknis pendidikan
 

Pengelola pelayanan pendidikan akan cenderung membiarkan proses belajar mengajar sesuai kemampuan tenaga pengajar yang ada. Usaha yang bersifat peningkatan proses belajar mengajar akan muncul dengan sendirinya akibat gerakan “dari dalam” pribadi masing-masing tenaga pengajar. Dalam hal ini, pengiriman (pengembangan) ilmu dan kepribadian tenaga pengajar amat penting.
- b. Pada manajemen unit kerja di pemerintahan
 

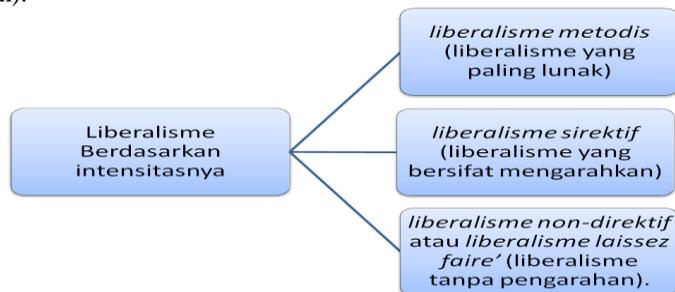
Proses koordinasi dan regulasi pendidikan akan difokuskan lebih pada pengembangan kualitas hasil belajar secara alami. Ini berarti proses kesadaran dan introspeksi diri maupun pemahaman akan ayat-ayat Tuhan menjadi fokus program pengembangan kualitas pendidikan.

## 2. Ideologi Liberal

Ideologi Liberal terdiri dari tiga tradisi yang terentang dari ungkapan yang paling kurang liberal (*liberalisme pendidikan* atau *liberalisme metodis*) hingga ke yang paling radikal (*anarkisme utopis*). Ketiga tradisi tersebut adalah:

### a. *Liberalisme Pendidikan*

Tujuan jangka panjang pendidikan bagi seorang pendidik liberal adalah melestarikan dan memperbaiki tatanan sosial yang ada dengan cara mengajarkan setiap peserta didik tentang ‘bagaimana menghadapi persoalan kehidupan secara mandiri dan efektif’. Berdasarkan intensitasnya, liberalisme terbagi ke dalam tiga variasi yakni *liberalisme metodis* (liberalisme yang paling lunak), *liberalisme sirektif* (liberalisme yang bersifat mengarahkan), dan *liberalisme nondirektif* atau *liberalisme laissez faire* (liberalisme tanpa pengarahan).



### b. *Liberasionisme Pendidikan*

Tradisi ini mempunyai sudut pandang bahwa perombakan harus dilakukan dalam lingkup yang besar terhadap tatanan politik yang ada saat ini, sebagai cara untuk memajukan kebebasan-kebebasan individu dan mempromosikan perwujudan potensi diri semaksimal mungkin. Cakupannya adalah sebuah spektrum pandangan yang luas, merentang dari *liberasionisme pembaharuan* (relatif bersifat konservatif) hingga *liberasionisme revolusioner* dengan seruannya agar sistem pendidikan segera mengambil peran aktif dalam menggulingkan tatanan politik yang ada sekarang.

Dalam pandangan ini, sekolah haruslah bersifat obyektif namun tidak sentral. Sekolah tidak hanya mengajarkan pada peserta didik tentang cara berpikir secara efektif (rasional dan ilmiah), melainkan juga membantu peserta didik mengambil kebijakan pemecahan masalah yang paling meyakinkan, sehubungan berbagai permasalahan manusia yang terpenting. Dalam hal ini, landasan yang digunakan adalah sistem kebenaran yang terbuka, namun hanya mencakup komitmen terhadap rangkaian tindakan yang didukung oleh *multi-stakeholder* tentang pengetahuan dalam komunitas intelektual di suatu saat tertentu. Orientasi pandangan ini berfokus pada permasalahan atau tata cara.

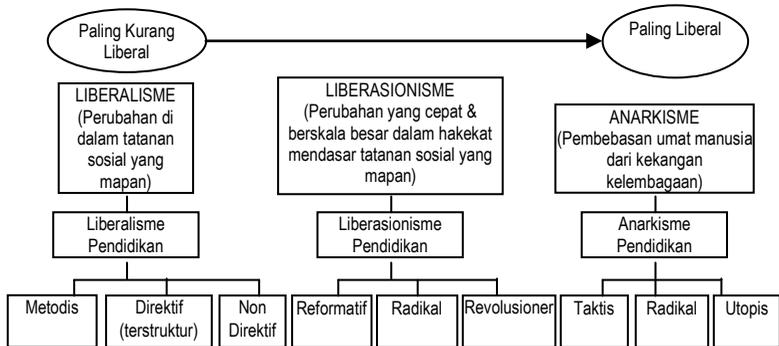
c. *Anarkisme Pendidikan*

Dalam liberalisme, secara umum, pendidik menerima sistem penelitian eksperimental yang terbuka atau pembuktian pengetahuan melalui penalaran ilmiah. Anggapan pendidik anarkis adalah harus menekankan perlunya meminimalkan dan atau menghapuskan pembatasan kelembagaan terhadap perilaku personal. Dengan kata lain, *mendeinstitutionalisasi masyarakat* dilakukan sehingga masyarakat bebas lembaga. Dalam pandangan ini, pendekatan pendidikan yang terbaik adalah mempercepat perombakan humanistik berskala besar dengan cara menghapuskan sistem persekolahan.

Menurut Ivan Illich dan Paul Goodman dalam Mansour Faqih (2001:112), sudut pandang anarkisme pendidikan adalah berbagai posisi yang terentang dari *anarkisme taktis* (ingin melebur sekolah-sekolah sebagai cara untuk membebaskan kekayaan dan sumber daya yang terpakai untuk keperluan-keperluan yang mendesak), hingga ke *anarkisme utopis* (memimpikan terciptanya masyarakat yang secara permanen terbebaskan dari segala pembatasan kelembagaan).

Pendidikan disesuaikan dengan keadaan ekonomi dan politik, dimana tindakan teknis dari ideologi ini biasanya dilakukan. Contohnya adalah analisis urgensi membangun kelas dan fasilitas baru yang sesuai modernisasi peralatan sekolah.

Selain itu, berbagai investasi dilakukan untuk meningkatkan metodologi pengajaran dan pelatihan yang lebih efisien dan partisipatif, seperti kelompok dinamik, *learning by doing*, *experimental learning*, atau Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). Usaha tersebut terisolasi dengan sistem dan struktur ketidakadilan kelas dan gender, dominasi budaya dan represi politik yang ada dalam masyarakat.



Sumber : Mansour Faqih dalam William F O'neil, 2001, hal: 111-113

Gambar 1.2  
Perspektif dalam Ideologi Pendidikan Liberal

Terdapat 2 implikasi penerapan ideologi Liberal, yaitu:

- 1) Pada pengelola satuan teknis pendidikan  
Proses pelayanan pendidikan bukan merupakan pelayanan dasar kemasyarakatan. Permasalahan masyarakat bukan menjadi bahan ajar proses belajar mengajar. Ini berarti bahwa fokus pelayanan pendidikan semata-mata mentransfer ilmu pengetahuan ke peserta didik.
- 2) Pada manajemen unit kerja pemerintahan  
Proses koordinasi dan regulasi lebih fokus pada maksimalisasi transfer ilmu pengetahuan ke peserta didik. Implementasi pengembangan pendidikan dapat dipilah dalam pengembangan sistem dan pengembangan fasilitas pendukung ilmu pengetahuan.  
Kaum Liberal dan Konservatif sama-sama berpendirian bahwa pendidikan adalah *a-politik*, dan “mutu yang baik” harus merupakan target utama seluruh jenjang pendidikan.

Implikasi ideologi ini dapat diidentifikasi melalui pergerakan moral dan politis yang terjadi di berbagai satuan pelayanan teknis pendidikan, seperti sekolah. Ini berarti perilaku pengelola satuan teknis pendidikan dan manajemen unit kerja di pemerintahan dapat mengalami perubahan yang signifikan akibat penerapan ideologi yang berbeda.

## C. IDEOLOGI PENDIDIKAN DAN KURIKULUM SEKOLAH

Sistem pendidikan mencerminkan penerapan ideologi organisasi pada individu, kelompok, sosial bahkan tingkat dunia. Di tingkat dunia, proses ideologisasi tampaknya telah dikaitkan dengan ekspansi sistem pendidikan yang berkembang luar biasa setelah Perang Dunia II, dan dengan berbagai karakteristik yang terkait sistem pendidikan nasional (Ramirez dan Boli 1987; Meyer, Ramirez dan Soysal 1992; Wong 1991; McNeely 1995). Untuk itu, dibutuhkan upaya untuk menilai karakter dan perubahan dalam proses ideologisasi dengan memeriksa tujuan pendidikan negara-negara di seluruh dunia. Hal ini ditujukan sebagai indikator yang tidak hanya untuk ideologi pendidikan di tingkat masyarakat dan dunia, tetapi juga indikator terkait kurikulum sekolah.

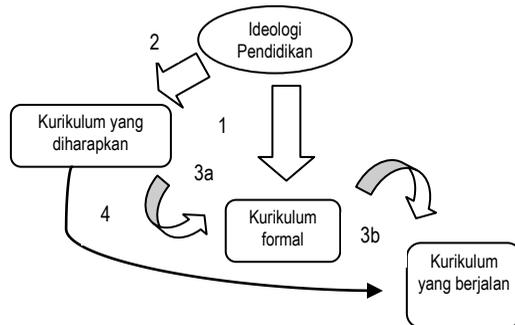
### 1. Ideologi Pendidikan dan Revolusi Pendidikan Dunia

Permasalahan utama yang mendorong banyak penelitian kontemporer mengenai budaya dunia, masyarakat dunia dan/atau pemerintahan dunia merupakan upaya pemahaman ekspansi dramatis dunia pendidikan sejak Perang Dunia II. Banyak pekerjaan yang menggarisbawahi cara, di mana variasi nasional dalam berbagai faktor politik dan ekonomi muncul untuk memberikan penjelasan yang buruk untuk ekspansi pendidikan di seluruh dunia. Salah satu yang muncul adalah pembangunan ekonomi dan integrasi nasional. Contoh modelnya adalah mensinergikan perekonomian melalui pembangunan jalan dimana sekolah anak didik mempunyai akses terhadap berbagai alat dan gaya hidup dunia modern. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat dunia berfokus pada sektor pendidikan dan kelembagaan lainnya (Meyer, et al, 1997 Boli; Jepperson 2002).

Ada argumen yang beranggapan bahwa model tingkat dunia pendidikan mungkin telah memainkan peran dalam ekspansi pasca Perang Dunia II. Menurut penelitian Fiala dan Gordon Lanford (1987), hal tersebut merupakan periode awal dari revolusi dunia pendidikan di seluruh dunia. Selaras dengan yang disebut ideologi pendidikan tingkat dunia, Fiala dan Gordon Lanford menemukan fokus utama pendidikan, yaitu pengembangan individu, ekonomi, dan bangsa. Dalam hal ini, keburukan sistem pendidikan tidak diartikulasikan dalam bentuk kurikulum, sesuai rasionalitas formal dari kurikulum formal. Hal ini dapat menjauhkan dari rasionalitas substantif pada

kurikulum yang diharapkan, sehingga pembentukan kurikulum baru dapat terkendala pada saat formalisasi kurikulum baru tersebut.

Pada titik ini, kurikulum merupakan wujud tujuan umum pendidikan yang merupakan ekspresi ideologi pendidikan yang dipilih (Gambar 1.3). Data pelaksanaan pendidikan akan menjadi alat verifikasi tujuan pendidikan dengan indikator yang telah ditetapkan dalam kurikulum.



Gambar 1.3  
Hubungan Antara Ideologi Pendidikan dan Tipe Kurikulum Sekolah

## 2. Ideologi dan Utopia dalam Sistem Pendidikan

Konsep ideologi sangat beragam. Sebagian besar ideologi tersebut mengacu pada pandangan dunia atau kesepakatan kolektif suatu populasi. Pandangan dunia memberikan penilaian kognitif dari sifat realistik dan penilaian normatif tentang apa yang harus dilakukan. Ideologi pendidikan akan mengacu pada pandangan dunia tentang sistem pendidikan. Pendapat Mannheim (1959) tentang ideologi klasik dan utopia menjelaskan hubungan antara ideologi pendidikan dan kurikulum yang diharapkan.

Mannheim membedakan antar berbagai ideologi dengan memberikan penekanan pentingnya ideologi secara universal. Sebagai contoh, ideologi yang mendasarkan diri pada psikologi individu, laki-laki atau perempuan, akan cenderung mendukung tindakan yang sesuai kepentingan jenis kelamin. Sementara ideologi secara universal akan meletakkan basisnya pada kelompok sosial. Ideologi secara universal ini akan mengorganisir prinsip dan tatanan sosial. Konsep ideologi secara universal ini telah diterapkan sebagai ideologi pendidikan melalui prinsip pendidikan dan tatanan hubungan sosial antar pelaku pendidikan. Namun, Mannheim mengingatkan

bahwa ideologi dapat membawa *utopia*, dimana dalam kondisi *utopia*, ideologi yang telah disepakati akan mendobrak tatanan sosial yang dibentuknya, untuk membentuk realitas sosial yang baru (Mannheim 1959 [1936]: 192).

*Utopia* yang dibawa dalam ideologi pendidikan, memberikan energi emosional bagi individu dan organisasi. Bahan ajar pendidikan akan terperangkap dalam kondisi 'tidak nyata' karena masyarakat tidak pernah mewujudkannya. Hal ini menunjukkan bahwa para peserta didik hidup dalam batas-batas tatanan sosial yang ada (Mannheim 1959 [1936]: 194). Ini berarti bahwa unsur *utopia* berfungsi sebagai kritik dan pengubah kurikulum formal pendidikan. Sehingga ideologi pendidikan mengarahkan sistem pendidikan pada:

- a. Perkembangan individu secara utuh, dengan asumsi kesetaraan manusia dan kebutuhannya;
- b. Pembangunan bangsa berbasiskan ekonomi dengan fokus reproduksi sumber daya ekonomi;
- c. Pengakuan atas nilai kesetaraan, demokrasi, dan hak dasar manusia dalam pendidikan.

Banyak negara melupakan pembangunan identitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan variasi regional yang membawa variasi budaya dan sejarah. Dalam ideologi pendidikan, variasi identitas, perkembangan dan regional amat menentukan hasil dari sistem pendidikan.

Dari tiga elemen ideologi pendidikan, kognitif, normatif, dan komponen *utopia*, ideologi pendidikan memberikan penilaian kognitif bagaimana pendidikan bekerja, sementara juga menyediakan penilaian normatif tentang bagaimana harus bekerja. Pada aspek kognitif, perkembangan individu lebih ditekankan. Sementara pada aspek normatif, kesetaraan dan keadilan lebih diutamakan.

Dalam aspek kognitif, konten *utopia* amat besar berpengaruh dalam perluasan kurikulum yang diharapkan. Implementasi sistem pendidikan akan terkendala dengan aspek politik ekonomi yang ada dalam merealisasikan pengembangan pribadi dan emosional, dan kesetaraan pengembangan demokrasi serta keadilan.

Karakter *utopis* merupakan porsi yang menentukan dalam ideologi pendidikan sehingga implikasi kurikulum formal pada kurikulum yang terealisasi akan dapat dipahami dengan mengidentifikasi karakter *utopis* tersebut. Kesenjangan yang terjadi dapat dipenuhi dengan melakukan

modifikasi berbasiskan karakter *utopis* tersebut (relasi 4 pada Gambar 1.3). Sebagai contoh, ideologi pendidikan yang tak membedakan antara laki-laki dan wanita akan mendorong modifikasi kurikulum pada aktivitas pengajarannya sesuai karakter maskulinitas dan feminisme para peserta didiknya.

Ideologi pendidikan yang terwujud dalam kurikulum yang diharapkan, di era pasca-Perang Dunia II, nampaknya masih mengalami stagnasi di akhir abad 20. Ideologi pendidikan mengekang fokus sistem pendidikan pada pengembangan ekonomi, pertumbuhan bangsa, dan pengembangan individu. Selain itu, secara normatif, sistem yang sedang berjalan diwajibkan mengembangkan nilai kesetaraan dan demokrasi. Ini merupakan perwujudan hubungan 2 pada Gambar 1.3. Oleh sebab itu, pekerjaan riset di masa depan akan memfokuskan diri pada dampak dinamika masyarakat dan hubungan antarnegara di tingkat global. Sehingga permasalahan klasik hubungan antara rasionalitas substantif dari kurikulum yang diharapkan dan rasionalitas formal dari kurikulum formal akan dapat dipecahkan melalui konsep relevan (sesuai konteks masyarakat yang akan dibentuk). Sesuai hubungan 4 pada Gambar 1.3, sistem pendidikan akan menjadi pembentuk masyarakat melalui kurikulum yang berjalan pada berbagai sekolah pendidikan di mana masyarakat itu berada. Usaha ini merupakan terobosan untuk menggabungkan ideologi dengan gerakan *utopia* pada tingkat individu, masyarakat dan dunia.

Untuk memperdalam, kerjakan latihan-latihan berikut ini dan bacalah rangkuman untuk mempermudah Anda memperoleh kata kuncinya.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan mengenai hakikat ideologi!
- 2) Jelaskan aspek ideologi dan empiris pendidikan yang berkembang selama ini!
- 3) Jelaskan mengenai ideologi pendidikan!
- 4) Jelaskan mengenai kurikulum sekolah!

*Petunjuk jawaban latihan*

- 1) Baca Kegiatan Belajar I Modul 1 pada bagian Hakikat Ideologi (hakekat ideologi merupakan satu aturan yang bertautan luas antara ide-ide dan keyakinan tentang dunia yang diselenggarakan oleh sekelompok orang yang menunjukkan perilaku dan percakapan ke berbagai orang atau masyarakat.)
- 2) Baca Kegiatan Belajar I Modul 1 pada bagian Aspek Ideologi dan Empiris Pendidikan yang Berkembang Saat ini (aspek ideologi dan empiris pendidikan yang berkembang selama ini yaitu tiga ideologi Konservatif (Fundamentalisme Pendidikan, Intelektualisme Pendidikan, dan Konservatisme Pendidikan), dan tiga ideologi Liberalisme (Liberalisme Pendidikan, Liberasionisme Pendidikan, dan Anarkhisme Pendidikan).
- 3) Baca Kegiatan Belajar I Modul 1 pada bagian Ideologi Pendidikan dan Kurikulum Sekolah (ideologi pendidikan mencerminkan sistem pendidikan organisasi pada individu, kelompok, sosial dan bahkan tingkat dunia.)
- 4) Baca Kegiatan Belajar I Modul 1 pada bagian Ideologi Pendidikan dan Kurikulum Sekolah (kurikulum sekolah merupakan wujud tujuan umum pendidikan yang merupakan ekspresi ideologi pendidikan yang dipilih.)



## RANGKUMAN

---

Keyakinan atau pandangan dunia adalah contoh dari apa yang pakar sosiologi sebut sebagai ideologi. Ideologi didefinisikan sebagai satu aturan yang bertautan luas antara ide-ide dan keyakinan tentang dunia yang diselenggarakan oleh sekelompok orang yang menunjukkan perilaku dan percakapan ke berbagai orang atau masyarakat.

Kata *ideologi pendidikan* erat kaitannya dengan kata *filosofi pendidikan*. Dalam makna yang lebih mendasar, istilah *filosofi pendidikan* menangkap perbedaan dalam pendekatan-pendekatan mendasar secara lebih tajam. Ideologi pada umumnya berkonotasi ketidakberubahan. Ada empat hal dalam ideologi pendidikan yang terkait dengan sistem filosofis. Tidak satupun ideologi pendidikan tersebut yang bersifat tunggal atau monolitik.

Ideologi konservatif dibangun berdasarkan keyakinan bahwa masyarakat tidak bisa merencanakan perubahan, hanya Tuhan yang merencanakan keadaan masyarakat. Ada tiga tradisi pokok ideologi

pendidikan konservatif, serta dua sudut pandang fundamentalisme pendidikan, yaitu: (1) fundamentalisme pendidikan religius, dan (2) fundamentalisme pendidikan sekuler. Intelektualisme pendidikan lahir dari ungkapan konservatisme politik yang berdasarkan sistem pemikiran filosofis atau religius yang pada dasarnya otoritarian. Konservatisme dalam dunia pendidikan beranggapan bahwa tujuan utama sekolah adalah pelestarian dan penerusan pola sosial yang telah ada serta tradisi yang sudah mapan. Ada 2 implikasi penerapan ideologi konservatif, yaitu: a) pada pengelola satuan teknis, dan b) pada manajemen unit kerja di pemerintahan.

Tujuan jangka panjang pendidikan bagi seorang pendidik liberal adalah melestarikan dan memperbaiki tatanan sosial yang ada dengan cara mengajar setiap siswa sebagaimana caranya menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupannya sendiri secara efektif. Liberasionisme Pendidikan memiliki sudut pandang bahwa perombakan harus dilakukan dalam lingkup yang besar terhadap tatanan politik yang ada sebagai cara untuk memajukan kebebasan individu dan mempromosikan perwujudan potensi diri semaksimal mungkin. Landasan yang digunakan adalah sistem kebenaran yang terbuka namun hanya mencakup komitmen terhadap rangkaian tindakan yang didukung oleh *multi-stakeholder*. Anggapan pendidik anarkis adalah harus menekankan perlunya meminimalkan dan atau menghapuskan pembatasan kelembagaan terhadap perilaku personal. Anarkisme pendidikan adalah berbagai posisi yang terentang dari anarkisme taktis, hingga ke anarkisme utopis. Ada 2 implikasi penerapan ideologi liberal, yaitu: a) pada pengelola satuan teknis pendidikan, dan b) pada manajemen unit kerja pemerintahan. Perilaku pengelola satuan teknis pendidikan dan manajemen unit kerja di pemerintahan dapat mengalami perubahan yang signifikan akibat penerapan ideologi yang berbeda.

Sistem pendidikan mencerminkan penerapan ideologi organisasi pada individu, kelompok sosial dan bahkan tingkat dunia. Contoh modelnya adalah mensinergikan perekonomian melalui pembangunan jalan dimana sekolah anak didik mempunyai akses terhadap berbagai alat dan gaya hidup dunia modern. Fiala dan Gordon Lanford menemukan tujuan utama pendidikan yang fokus pada pengembangan individu, ekonomi, dan bangsa. Kurikulum merupakan wujud tujuan umum pendidikan yang merupakan ekspresi ideologi pendidikan yang dipilih.

Ideologi pendidikan akan mengacu pada pandangan dunia atau kesepakatan kolektif suatu populasi. Konsep ideologi secara universal ini telah diterapkan sebagai ideologi pendidikan melalui prinsip pendidikan dan tatanan hubungan sosial antarpelaku pendidikan. Unsur *utopia*

berfungsi sebagai kritik dan pengubah kurikulum formal pendidikan. Banyak negara melupakan pembangunan identitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan variasi regional yang membawa variasi budaya dan sejarah. Ideologi pendidikan memberikan penilaian kognitif cara pendidikan bekerja, serta menyediakan penilaian normatif tentang cara harus bekerja. Konten *utopia* sangat besar pengaruhnya terhadap perluasan kurikulum yang diharapkan. Karakter *utopis* merupakan porsi yang menentukan dalam ideologi pendidikan sehingga implikasi kurikulum formal pada kurikulum yang terealisasi akan dapat dipahami dengan mengidentifikasi karakter *utopis*. Ideologi pendidikan mengekang fokus sistem pendidikan pada pengembangan ekonomi, pertumbuhan bangsa, dan pengembangan individu.



### TES FORMATIF 1

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Satu aturan yang bertautan luas antara ide-ide dan keyakinan tentang dunia yang diselenggarakan oleh sekelompok orang yang menunjukkan perilaku dan percakapan ke berbagai orang atau masyarakat. Pernyataan tersebut merupakan definisi ...
  - A. Ideologi Pendidikan
  - B. Hakikat Ideologi
  - C. Aspek Empiris Pendidikan
  - D. Filosofi Pendidikan
  
- 2) Ideologi pendidikan terkait dengan sistem filosofis dalam empat hal berikut ini, *kecuali*...
  - A. Merupakan sistem gagasan yang umum atau luas ketimbang kebanyakan filosofi
  - B. Ideologi umumnya berkonotasi ketidakberubahan
  - C. Mengarahkan tindakan sosial dan bukan sekadar menjernihkan ataupun menata pengetahuan
  - D. Merupakan sebab sekaligus akibat dari perubahan sosial yang mendasar.
  
- 3) Fiala dan Gordon Lanford menemukan fokus utama pendidikan, yaitu pengembangan ...
  - A. Klasikal, finansial, dan ekonomi
  - B. Ekonomi, komunitas, dan bangsa
  - C. Individu, bangsa, dan ekonomi
  - D. Negara, klasikal, dan ekonomi

- 4) Ideologi pendidikan mengarahkan sistem pendidikan pada ...
- A. Pembangunan bangsa berbasiskan ekonomi dengan fokus reproduksi sumberdaya ekonomi
  - B. Perkembangan individu secara menyeluruh, dengan asumsi keseimbangan manusia dan kebutuhannya
  - C. Pengakuan atas nilai keseimbangan, demokrasi dan hak asasi manusia dalam pendidikan
  - D. Tindakan sosial dan bukan sekadar menjernihkan ataupun menata pengetahuan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali  
80 - 89% = baik  
70 - 79% = cukup  
< 70% = kurang

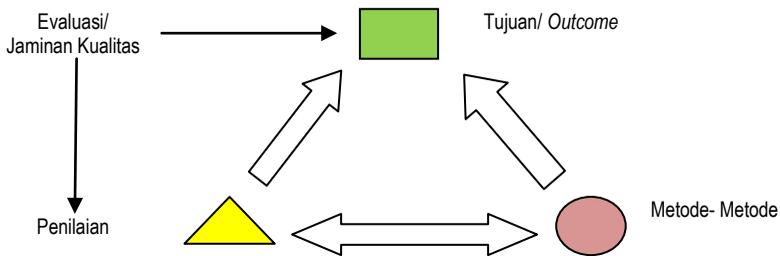
Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

## KEGIATAN BELAJAR 2

## Kerangka Sistem Pendidikan dan Desentralisasi Pendidikan

### A. KERANGKA SISTEM PENDIDIKAN

Diagram di bawah menunjukkan penerapan ideologi pendidikan dalam praktik pembelajaran di organisasi penyelenggara pelayanan pendidikan. Hasil pembelajaran dipengaruhi oleh metode, penilaian, evaluasi serta jaminan kualitas pembelajaran. Semua elemen tersebut saling berhubungan. Peran guru adalah sebagai manajer, yang memastikan bahwa setiap sesi terintegrasi dalam seluruh kurikulum yang dijalankan untuk mencapai tujuan yang dinyatakan melalui proses penilaian.



Gambar 1.4 Hubungan Antarelemen Sistem Pendidikan

Ketika merencanakan sebuah sesi atau program, harus diperhatikan bagaimana tujuan atau hasil yang akan dicapai (melalui pengajaran yang tepat dan metode pembelajaran). Pada saat penilaian dan pengevaluasian, diperlukan pertimbangan yang aktif dan terbuka dari proses pendidikan: interaksi guru, peserta didik dan pengetahuan. Stenhouse (1975) memikirkan tujuan kurikulum yang dipimpin sebagai '*straightjacket*' pendidikan dan mengusulkan pergeseran ke model *process-driven* dimana fasilitasi pembelajaran adalah pusat perhatian, dan hasil menjadi tak terduga. Hussey dan Smith (2008) menyebutnya 'koridor toleransi' yang memungkinkan ruang untuk belajar dan hasil yang muncul melalui proses belajar.

Kemudian penulis, seperti Grundy (1987) menunjukkan bahwa kurikulum terus dikembangkan untuk mengurangi kekosongan kompetensi akibat ketidakpastian perkembangan sebuah ilmu. Contohnya dalam ilmu kedokteran, dimana perubahan kurikulum dapat dilakukan apabila muncul kekosongan akan sebuah kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat, dalam hal ini jenis penyakit yang berkembang. Pendefinisian tujuan instruksional menjadi sangat detail dalam menentukan komponen inti dari keterampilan klinis. Perubahan kurikulum ini harus dilakukan secara bijaksana dengan hasil pembelajaran berupa kompetensi yang dapat dipenuhi, dengan tetap menekankan pentingnya proses pembelajaran.

## **B. DESENTRALISASI PENDIDIKAN**

### **1. Pengertian Desentralisasi**

Desentralisasi pendidikan tampaknya menjadi kecenderungan global dalam dekade terakhir. Astiz et al (2002) mengamati bahwa "selama beberapa dekade terakhir, telah terjadi desentralisasi dalam kebijakan pendidikan, khususnya di negara berkembang Amerika Latin, Asia Selatan, dan Eropa Timur dan di antara badan-badan pembangunan internasional" (p.70), dan Hanson (2000) menemukan bahwa "hampir setiap negara di Utara, Tengah, dan Amerika Selatan melakukan reformasi desentralisasi pendidikan...".

Desentralisasi dapat didefinisikan sebagai "transfer otoritas pengambilan keputusan, tanggung jawab, dan tugas dari organisasi yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah atau antara organisasi" (Hanson, 1998, hal 112). Setidaknya ada tiga jenis desentralisasi: dekonsentrasi, devolusi, dan delegasi. Menurut Paqueo dan Lammert (2000), "dekonsentrasi melibatkan pergeseran tanggung jawab manajemen dari pusat ke tingkat yang lebih rendah regional atau lainnya sehingga mempertahankan pusat kontrol. Delegasi terjadi ketika pemerintah pusat memberikan wewenang kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah, atau bahkan untuk organisasi semi, dengan pengertian bahwa kewenangan dapat ditarik". Selanjutnya, ketika kehilangan pengendalian dianggap sebagai hasil dari desentralisasi, tindakan dapat berubah menjadi mendapatkan kembali otoritas devolusi. Ini adalah proses yang kadang-kadang dinamai kembali sentralisasi.

## 2. Tipologi Desentralisasi Pendidikan

Tipologi desentralisasi kebanyakan dimulai dengan referensi yang diperlukan untuk dekonsentrasi, devolusi, dan delegasi. Desentralisasi pendidikan biasanya dilakukan dalam kerangka desentralisasi pemerintahan secara umum. Kebijakan desentralisasi pendidikan lebih difokuskan pada desentralisasi ke sekolah dan komite manajemen sekolah. Hal ini disebut sebagai praktik otonomi sekolah melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

- a. Dekonsentrasi pendidikan adalah pemindahan pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke tingkat lokal atau kantor daerah. Keputusan yang dimaksud adalah perekrutan, evaluasi, dan promosi personil, dan alokasi serta realokasi anggaran pendidikan. Akibatnya, proses administrasi pendidikan terkait guru dan tenaga kependidikan lainnya dilakukan di kantor pendidikan daerah. Ini berarti desentralisasi politik pendidikan juga terjadi.
- b. Devolusi pendidikan adalah pemindahan pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau lokal yang terpilih. Keputusan penunjukan kepala sekolah dan alokasi anggaran pendidikan regional / lokal ditetapkan oleh kepala daerah bersama legislatif. Sementara otonomi fiskal pendidikan masih sepenuhnya ditentukan dalam paket transfer dana pendidikan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya berperan besar dalam akuntabilitas penggunaan dana pendidikan. Ini berarti desentralisasi pelayanan pendidikan sudah dilakukan secara penuh, namun keputusan fiskal masih ditentukan bersama dengan pemerintah pusat. Contohnya penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah ditentukan melalui panduan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.
- c. Delegasi Pendidikan adalah pengalihan tugas kependidikan kepada kepala sekolah atau komite sekolah atau masyarakat lokal. Kepala sekolah bertanggungjawab sepenuhnya pada bangunan fisik sekolah dan pengelolaan keuangan untuk pembelajaran secara penuh. Penunjukan kepala sekolah ditentukan melalui pengusulan masyarakat lokal. Penggunaan keuangan sekolah disetujui oleh komite sekolah melalui mekanisme anggaran belanja sekolah. Fokus dari tipe desentralisasi ini adalah perluasan akses pendidikan melalui keterlibatan masyarakat lokal.

Tabel 1.1  
Matriks Desentralisasi Pendidikan dan Umum

Pendidikan/ Umum	Administratif	Fiskal	Politik
Desentralisasi kepada daerah	Memindahkan keputusan manajerial dan akuntabilitas manajerial dari kantor pendidikan pusat ke kantor pendidikan daerah.	Memberikan kewenangan kepada manajer di daerah untuk mengalokasikan dan mengalokasikan kembali (realokasi) anggaran.	Membentuk Dewan Pendidikan Daerah menjadi penasehat pengelolaan pendidikan daerah
Devolusi kepada pemerintah daerah	Para pengelola pendidikan dipilih di daerah.	Memberikan kewenangan pada pemerintah daerah tentang alokasi belanja, sesuai paket yang telah ditentukan pemerintah pusat	Pejabat pendidikan lokal melakukan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai ketentuan pemerintahan pusat.
Delegasi kepada kepala sekolah atau komite sekolah	Para kepala sekolah dan/atau komite sekolah menentukan personel, kurikulum dan alokasi belanja.	Para kepala sekolah dan/atau komite sekolah menerima dana dari pemerintah pusat, dengan menentukan sendiri alokasi belanja dan menarik pendapatan di daerah.	Komite sekolah dan kepala sekolah dipilih oleh masyarakat.
Delegasi kepada masyarakat lokal	Para kepala sekolah dan/atau komite sekolah membuat keputusan, bersama masyarakat lokal.	Pembiayaan pendidikan mandiri oleh masyarakat lokal ( <i>self-financing</i> ) dengan subsidi pemerintah pusat, khususnya area yang sulit terjangkau.	Kepala sekolah dan komite sekolah dipilih oleh masyarakat lokal.

Desentralisasi pendidikan dapat diklasifikasikan menurut pendekatan distribusi kekuasaan, dan pengambilan keputusan. Tabel berikut memberikan satu klasifikasi berbasis jenis keputusan yang dapat didesentralisasikan.

Tabel 1.2  
Tipe-Tipe Keputusan pada Tingkat Sekolah yang dapat Didesentralisasikan

Instruksi organisasi ( <i>Organization's Instruction</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memilih sekolah yang dihadiri siswa.</li> <li>- Mengatur waktu instruksi.</li> <li>- Memilih buku teks.</li> <li>- Menemukan muatan kurikulum.</li> <li>- Menentukan metode pengajaran.</li> </ul>
Manajemen personalia ( <i>Personnel Management</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memilih dan memberhentikan kepala sekolah.</li> <li>- Merekrut dan memberhentikan guru.</li> <li>- Mengatur atau menambah skala pembayaran kepada guru.</li> <li>- Memeriksa pertanggungjawaban guru.</li> <li>- Menentukan penyediaan dan pelatihan pelayanan.</li> </ul>

Perencanaan dan Struktur ( <i>Planning and Structures</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuka atau menutup sekolah.</li> <li>- Memilih program sekolah.</li> <li>- Mendefinisikan muatan pelajaran.</li> <li>- Mengatur ujian untuk memonitor kinerja sekolah.</li> </ul>
Sumber daya ( <i>Resources</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengembangkan rencana peningkatan sekolah.</li> <li>- Mengalokasikan anggaran pegawai.</li> <li>- Mengalokasikan anggaran nonpegawai.</li> <li>- Mengalokasikan sumber daya dalam layanan pelatihan guru.</li> </ul>

Ada beberapa indikator kunci yang dapat digunakan dalam mengukur distribusi kewenangan dalam mengambil keputusan pendidikan, yaitu:

1. Siapa yang menentukan perubahan margin akibat perubahan kompensasi guru?
2. Siapa yang membuat keputusan untuk merekrut atau mentransfer guru ke sekolah tertentu?
3. Siapa yang memilih kepala sekolah?
4. Apakah masyarakat sekolah atau pemerintah daerah sebagian membiayai sekolah?
5. Siapa yang memutuskan bagaimana mengalokasikan anggaran tahunan sekolah?

Untuk memperdalam, kerjakan latihan-latihan berikut ini dan bacalah rangkuman untuk mempermudah Anda memperoleh kata kuncinya.



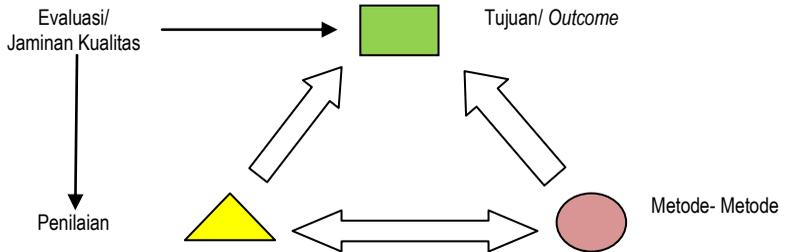
## LATIHAN \_\_\_\_\_

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan mengenai kerangka sistem pendidikan!
- 2) Jelaskan mengenai pengertian desentralisasi pendidikan!
- 3) Jelaskan mengenai tipologi desentralisasi pendidikan!

*Petunjuk jawaban latihan*

- 1) Baca Kegiatan Belajar II Modul 1 pada bagian Kerangka Sistem Pendidikan



Semua elemen tersebut saling berhubungan. Peran guru adalah sebagai manajer, yang memastikan bahwa setiap sesi terintegrasi dalam seluruh kurikulum yang dijalankan untuk mencapai tujuan yang dinyatakan melalui proses penilaian.

- 2) Baca Kegiatan Belajar II Modul 1 pada bagian Pengertian Desentralisasi (desentralisasi pendidikan dapat didefinisikan sebagai "transfer otoritas pengambilan keputusan, tanggung jawab, dan tugas dari organisasi yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah atau antara organisasi pendidikan")
- 3) Baca Kegiatan Belajar II Modul 1 pada bagian Tipologi Desentralisasi Pendidikan (tipologi desentralisasi pendidikan kebanyakan dimulai dengan referensi yang diperlukan untuk :
  1. Dekonsentrasi pendidikan yaitu pemindahan pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke tingkat lokal atau kantor daerah.
  2. Devolusi pendidikan yaitu pemindahan pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau lokal yang terpilih.
  3. Delegasi pendidikan yaitu pengalihan tugas kependidikan kepada kepala sekolah atau komite sekolah atau masyarakat lokal.)



## RANGKUMAN

---

Peran guru adalah sebagai manajer, yang memastikan bahwa setiap sesi terintegrasi dalam seluruh kurikulum yang dijalankan untuk mencapai tujuan yang dinyatakan melalui proses penilaian. Ketika merencanakan sebuah sesi atau program, harus memperhatikan tujuan atau hasil yang akan dicapai (melalui pengajaran yang tepat dan metode pembelajaran). Pada saat dinilai dan dievaluasi memerlukan pertimbangan yang aktif dan terbuka dari proses pendidikan: interaksi guru, siswa, dan pengetahuan. Kurikulum terus dikembangkan untuk mengurangi kekosongan kompetensi akibat ketidakpastian perkembangan sebuah ilmu.

Desentralisasi pendidikan tampaknya menjadi trend global dalam dekade terakhir. Desentralisasi dapat didefinisikan sebagai "transfer otoritas pengambilan keputusan, tanggung jawab, dan tugas dari organisasi yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah atau antara organisasi". Tipologi desentralisasi kebanyakan dimulai dengan referensi yang diperlukan untuk dekonsentrasi, devolusi, dan delegasi. Dekonsentrasi pendidikan adalah pemindahan pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke tingkat lokal atau kantor daerah. Devolusi pendidikan adalah pemindahan pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau lokal yang terpilih. Delegasi pendidikan adalah pengalihan tugas kependidikan kepada kepala sekolah atau komite sekolah atau masyarakat lokal.



## TES FORMATIF 2

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Hasil pembelajaran dipengaruhi oleh aspek berikut, *kecuali* ...
  - A. Metode
  - B. Media
  - C. Evaluasi
  - D. Kualitas pembelajaran
  
- 2) Definisi desentralisasi sebagai "transfer otoritas pengambilan keputusan, tanggung jawab, dan tugas dari organisasi yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah atau antara organisasi" diungkapkan oleh ..
  - A. Lammert
  - B. Hanson

- C. Paqueo  
D. Smith
- 3) Pemandangan pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke tingkat lokal atau kantor daerah. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari ...  
A. Delegasi Pendidikan  
B. Devolusi Pendidikan  
C. Dekonsentrasi Pendidikan  
D. Depresi Pendidikan
- 4) Pengalihan tugas kependidikan kepada kepala sekolah atau komite sekolah atau masyarakat lokal. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari ...  
A. Delegasi pendidikan  
B. Devolusi pendidikan  
C. Dekonsentrasi pendidikan  
D. Depresi pendidikan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali  
80 - 89% = baik  
70 - 79% = cukup  
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

## KEGIATAN BELAJAR 3

## Manajemen Pendidikan di Indonesia

## A. ARAH PANDANGAN PENDIDIKAN INDONESIA

Arah pandangan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia mengarah pada sepuluh nilai kemasyarakatan, sebagai berikut:

1. *Kesetaraan.* Nilai kesetaraan dapat diinterpretasikan sebagai nilai dimana kesempatan untuk hidup lebih baik dan berpartisipasi lebih dalam aktivitas kemasyarakatan adalah sama bagi semua warga masyarakat. Akses pendidikan harus dapat dimiliki oleh semua warga untuk semua jenjang pendidikan. Ketidakadilan dalam akses pendidikan akan menyebabkan ketimpangan sosial yang menuju kecemburuan dan akhirnya perpecahan. Kualitas pendidikan merupakan sebuah pelayanan pendidikan yang harus didapatkan oleh semua warga dalam melakukan pembelajaran di berbagai sekolah. Ketidaksamaan kualitas pelayanan pendidikan akan menyebabkan diskriminasi pengetahuan, dan akhirnya pembentukan kelompok masyarakat terpisah. Hal ini akan mengakibatkan kesulitan dalam mengintegrasikan bangsa ini. Untuk menghindari ketidakadilan dalam akses dan ketidaksamaan kualitas pelayanan pendidikan, pemerintah harus berperan sebagai faktor standarisasi pelayanan dan akses pendidikan.
2. *Wahana pemberdayaan bangsa.* Melalui pendidikan, pembentukan karakter masyarakat masa depan akan dilakukan melalui ilmu pengetahuan, kepribadian individu bangsa, dan kemampuan bekerjasama. Hal ini akan menyiapkan masyarakat Indonesia untuk siap bekerjasama dalam menghadapi tantangan.
3. *Pemberdayaan masyarakat.* Melalui pendidikan, peran masyarakat dalam pembangunan menjadi lebih jelas dan profesional. Akibatnya, persyaratan materi yang diajarkan dan kompetensi yang dihasilkan telah direncanakan dan dikaji lebih matang jauh hari sebelumnya. Sehingga, partisipasi masyarakat sudah dapat ditanamkan semenjak menjalani pendidikan.
4. *Kemandirian dan pemerataan.* Melalui pendidikan, kemampuan warga masyarakat untuk bekerja baik secara mandiri maupun sebagai staf telah dibekali sejak bangku pendidikan.

5. *Toleransi dan konsensus*. Melalui pendidikan, pemahaman akan konsep-konsep pembangunan dan kemasyarakatan didiskusikan secara tajam sehingga kesamaan pemahaman akan dapat dihasilkan.
6. *Perencanaan pendidikan*. Perencanaan dilakukan dengan mengikutkan *multi-stakeholder* pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan sehingga tim perencanaan dapat menghasilkan dokumen perencanaan pendidikan sebagai batasan program dan kegiatan pendidikan di tahun yang akan datang.
7. *Rekonstruksi*. Dunia pendidikan merupakan arena untuk melakukan kajian tentang sejarah dan masa lalu sebuah bidang. Selain itu, dunia pendidikan melakukan rekonstruksi berbasiskan data masa lalu dan informasi masa kini untuk melakukan prakiraan strategi masa yang akan datang.
8. *Orientasi peserta didik*. Peserta didik dipersiapkan untuk menjadi warga masyarakat Indonesia yang baik sesuai dengan budaya dan tradisi masyarakat Indonesia.
9. *Pendidikan multikultural*. Melalui pendidikan, bangsa Indonesia dipersiapkan untuk hidup dalam perbedaan dengan mengajarkan sikap toleransi dan demokrasi.
10. *Prinsip global*. Melalui pendidikan, bangsa Indonesia akan mampu bersaing dalam persaingan global dan memenangkannya dalam kerangka menjadi negara besar di dunia.

## **B. IDEOLOGI PENDIDIKAN INDONESIA**

Jika penyelenggaraan pendidikan Indonesia diteliti lebih mendalam, ideologi yang digunakan mengarah ke ideologi konservatif dan turunannya. Hal ini dapat dilihat dari tujuan pendidikan yang selama ini lebih ditujukan untuk membangkitkan dan meneguhkan kembali bahwa peserta didik adalah makhluk Tuhan yang bertakwa. Kemudian di tingkat sekolah, adanya sekolah didasari untuk membantu membangun kembali masyarakat dengan cara mendorong langkah kembali ke tujuan aslinya dan agar tetap konsisten dengan tujuan tersebut. Selain itu, sekolah diadakan untuk menyalurkan informasi dan ketrampilan-ketrampilan yang perlu agar tatanan sosial kemasyarakatan berketuhanan Yang Maha Esa dapat berjalan secara ekonomis dan sosial kemasyarakatan. Hal ini merupakan ciri dari ideologi konservatif dan turunannya.

Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan global, pendidikan pun berupaya untuk mengikuti perkembangan jaman tersebut. Perubahan paradigma pendidikan yang telah terjadi, antara lain:

- a. Paradigma proses pendidikan yang berorientasi kepada guru/dosen/lembaga bergeser ke sistem yang berorientasi kepada peserta didik
- b. Paradigma proses pendidikan tradisional yang berorientasi kepada pendidikan klasikal dan formal di dalam kelas, bergeser ke model pembelajaran yang lebih fleksibel, misalnya pendidikan jarak jauh
- c. Penentuan mutu (kualitas) pendidikan dilakukan melalui proses perbandingan (akreditasi) dengan standar internasional (*world class level*)
- d. Semakin populernya pendidikan seumur hidup, menyebabkan pendidikan formal dan informal mengalami perubahan proses dan orientasi pelayanan
- e. Batas pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah menjadi semakin cair melalui proses sertifikasi

## C. REALITA PENDIDIKAN DI INDONESIA

Sektor pendidikan di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup besar selama dua dekade. Pada tahun 1998, tingkat pendaftaran ke sekolah dasar mencapai lebih dari 90%. Namun, sektor ini juga diwarnai oleh tingginya angka anak putus sekolah dan rendahnya angka siswa yang melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Krisis ekonomi juga telah memperparah situasi, terutama bagi keluarga miskin.

Selain itu, dalam masalah kualitas pendidikan, Indonesia merupakan yang terburuk di antara 12 negara Asia, yang juga menempatkan Indonesia di urutan paling bawah di antara negara-negara ASEAN. Beberapa kelemahan yang ada yang perlu mendapat catatan adalah rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan di banyak sekolah dasar, ketimpangan akses menuju pendidikan tingkat menengah, pengelolaan pendidikan yang tidak efisien, metode pengajaran yang sudah ketinggalan jaman, dan kurangnya peran serta orang tua dalam pendidikan anak-anaknya.

Data lain menunjukkan, peringkat *Human Development Index* (HDI) Indonesia memang membaik dalam beberapa tahun terakhir, tetapi masih jauh di bawah peringkat tahun 1977 (urutan ke-99), yaitu urutan 102 (tahun

2002), 110 (tahun 2005), dan 107 (tahun 2012). Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia semakin jauh tertinggal dari negara-negara tetangga, termasuk Vietnam yang kini di urutan 105, meloncat dari urutan 120 (tahun 1995) dan 108 (tahun 2005). Urutan negara lainnya adalah Sri Lanka (99), Filipina (90), China (81), Thailand (78), Malaysia (63), Brunei (30), Korsel (26), Singapura (25), dan Hongkong (21).

Posisi Indonesia ini memunculkan pertanyaan, “apa yang sebenarnya terjadi dalam pengelolaan sektor pendidikan setelah tahun 1977?”. Mengapa kita tidak mengalami kemajuan yang pesat dibanding kemajuan pendidikan negara-negara lain di Asia? Mengapa kita justru mundur dalam kualitas hasil belajar dibanding kualitas pendidikan negara-negara lain di Asia? Berbagai pertanyaan inilah yang harus dijawab, sebagai introspeksi diri dalam pengelolaan sektor pendidikan selama ini.

Di dalam negeri, beberapa gejala yang menunjukkan mundurnya dunia pendidikan dapat terlihat pada indikasi disparitas antarwilayah. Hanya 41% anak usia SMP di Papua bersekolah, sementara di DIY 77%. Untuk SD, Papua 80%, sementara di Kalimantan Tengah 95%. Untuk SMA hanya 20% anak usia SMA di Sulawesi Barat sekolah, sedangkan di DIY 62%. Ini berarti, masih jauh dari target *pendidikan untuk semua*.

#### **D. IMPLIKASI HASIL PEMBANGUNAN TERHADAP SEKTOR PENDIDIKAN**

Hasil pembangunan per Orde selama ini ternyata bermuara pada krisis ekonomi. Dampak krisis ekonomi dalam dunia pendidikan adalah menurunnya kemampuan masyarakat dalam membayar biaya pendidikan, meningkatnya pengangguran termasuk pengangguran terdidik, berkurangnya kepekaan sosial, pertikaian antarkelompok, dan migrasi termasuk anak usia sekolah. Hal ini terjadi pada masa Orde Lama maupun Orde Baru.

Tantangan yang dihadapi kemudian adalah bagaimana pendidikan dapat ikut merehabilitasi persoalan-persoalan tersebut. Selain itu, salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kinerja sektor pendidikan di daerah melalui pemberdayaan kemampuan lokal, meningkatkan peran serta masyarakat, terjaminnya pemerataan pendidikan, dan meningkatkan mutu pendidikan. Tujuan tersebut harus dicapai dalam konteks kepentingan nasional. Indikasi keberhasilan pencapaian tujuan

tersebut akan terlihat sejak proses perencanaan dan penganggaran pada setiap entitas pendidikan di Indonesia.

## **E. PERUBAHAN PARADIGMA PENDIDIKAN INDONESIA: DESENTRALISASI PENDIDIKAN**

### **1. Pengertian Desentralisasi Pendidikan**

Pendidikan seharusnya menjadi kepedulian semua komponen bangsa karena kualitas masa depan manusia sangat tergantung pada pendidikannya. Dewasa ini, kita semakin tahu bahwa globalisasi menyebabkan adanya pergeseran di berbagai bidang, misalnya di bidang ekonomi terjadi liberalisasi. Dalam bidang politik, terjadi adanya demokratisasi dan di dalam bidang budaya terjadi universalisasi nilai-nilai, yang memunculkan kebutuhan upaya untuk mempertahankan jati diri bangsa.

Seiring berlakunya otonomi daerah di Indonesia, pemikiran tentang desentralisasi juga tumbuh. Salah satu pesan yang tertuang dalam UU no 32 tahun 2004 waktu itu adalah bahwa daerah berkewajiban menangani pendidikan. Persoalan mendasar dalam penanganan pendidikan ini harus selaras dengan arah perubahan kebijakan pendidikan yang terjadi. Untuk memahami dampak perubahan kebijakan, dasar pemikiran kebijakan desentralisasi pendidikan atau paradigma yang mendasarinya harus dapat diuraikan dengan baik. Berikut berbagai aspek yang berubah akibat perubahan paradigma pendidikan:

Tabel.1.3  
Perubahan Paradigma Pendidikan dari Paradigma Lama ke Paradigma Baru

Keterangan	Paradigma Lama	Paradigma Baru
Orientasi kebijakan	Sentralistik	Desentralistik
Arah kebijakan	Kebijakan yang <i>top down</i>	Kebijakan yang <i>bottom up</i>
Fokus	Orientasi pengembangan parsial: pendidikan untuk pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik dan teknologi perakitan	Orientasi pengembangan holistik: pendidikan untuk pengembangan kesadaran untuk bersatu dalam kemajemukan budaya, menjunjung tinggi nilai moral, kemanusiaan, agama, kesadaran kreatif, produktif, dan kesadaran hukum
Peranan pemerintah dan masyarakat	Peran pemerintah sangat dominan	Meningkatkan peran serta masyarakat secara kualitatif dan kuantitatif
<i>Stakeholders</i>	Lemahnya peran institusi non sekolah	Pemberdayaan institusi masyarakat, keluarga, LSM, pesantren, dan dunia usaha

Sumber: Modifikasi dari Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, 2001, hal 5

Desentralisasi di bidang pendidikan telah menjadi salah satu agenda utama pemerintah, dan tentunya dengan segala konsekuensi logis diterapkannya kebijakan tersebut. Pertanyaannya adalah sejauh mana pemerintah telah menempatkan atau menjadikan isu peningkatan mutu pendidikan sebagai agenda strategis pembangunan, baik pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Agenda strategis tersebut harus menjadi keputusan politik pemerintah yang tercermin dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah. Secara konstitusional, telah ditetapkan bahwa pemerintah diwajibkan mengalokasikan dana untuk pendidikan sebesar 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan landasan konstitusional tersebut, Pemerintah memiliki kewajiban imperatif sebagai prioritas keputusan politik, yaitu peningkatan dana sektor pendidikan. Dana tersebut disediakan untuk pengembangan sarana prasarana, bahan dan peralatan, peningkatan kesejahteraan, dan promosi guru dan tenaga pendidikan. Prinsip selektivitas, obyektivitas, dan kemampuan bersaing dijadikan kriteria pengadaan sarana dan prasarana serta sistem promosi tenaga kependidikan, baik di swasta maupun negeri. Perubahan kebijakan sampai dengan saat ini belum diikuti dengan peningkatan mutu

keluaran pendidikan dasar dan menengah maupun pendidikan tinggi. Hal ini diakibatkan oleh:

1. Kurikulum kurang relevan dengan tuntutan dan kebutuhan pembentukan kompetensi lulusan
2. Belum terpenuhinya tuntutan akan kemampuan profesionalisme guru-guru baik dilihat dari kompetensi, kualifikasi pendidikan, maupun status sosial dan ekonomi profesi guru
3. Lemahnya dukungan keuangan dalam menjamin tersedianya sarana dan prasarana yang menjamin mutu proses pendidikan.

Diperlukan langkah-langkah konkrit dalam memperkuat mutu pendidikan dasar dan menengah serta tinggi yaitu:

1. Memperkuat kurikulum dalam arti revisi yang menjamin relevansi, efisiensi, efektivitas, dan produktivitas pembentukan kompetensi.
2. Memperkuat kapasitas manajemen sekolah dan perguruan tinggi melalui implementasi manajemen berbasis sekolah dan Badan Layanan Umum.
3. Memperkuat sumber daya tenaga kependidikan melalui penguatan sistem pendidikan tenaga kependidikan, peningkatan inovatif guru-guru dalam mengembangkan proses pembelajaran, dan mengoptimalkan fungsi-fungsi tenaga kependidikan.
4. Memperkuat kapasitas keuangan sekolah dan perguruan tinggi melalui kegiatan inovatif pengabdian masyarakat.
5. Perlu kemauan politik pemerintah dalam memberikan prioritas dukungan finansial sekitar 20% anggaran untuk sektor pendidikan.

Pelaksanaan desentralisasi pendidikan dalam otonomi daerah hanya akan berhasil bila didasarkan atas konsep yang jelas. Menurut Rondinelli (1998), desentralisasi adalah penyerahan otoritas pusat ke daerah-daerah. Sehingga, desentralisasi pendidikan dapat diartikan sebagai penyerahan otoritas bidang pendidikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, menurut aturan yang berlaku. Desentralisasi berangkat dari otoritas pusat yang diserahkan ke daerah.

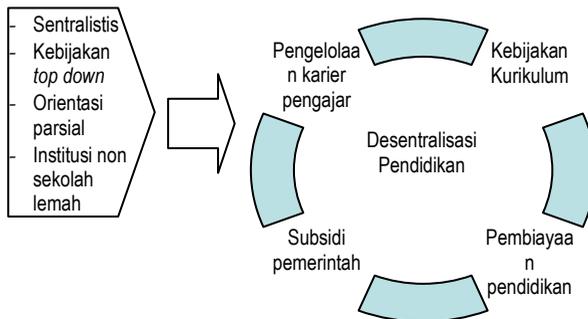
Acuan pemikiran dalam penataan dan pengembangan sistem pendidikan nasional harus mampu mengakomodasi berbagai pandangan secara selektif sehingga terdapat keterpaduan dalam konsep. Selain itu, pengembangan pendidikan juga dilakukan berdasarkan prinsip yang ada. Adapun prinsip-

prinsip yang terkandung dalam arah baru pengembangan pendidikan nasional itu (Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, 2001, hal 5) adalah :

- a. Kesetaraan perlakuan sektor pendidikan dengan sektor lain
- b. Pendidikan berorientasi pada rekonstruksi sosial
- c. Pendidikan dalam rangka pemberdayaan bangsa
- d. Pemberdayaan infrastruktur sosial untuk kemajuan pendidikan nasional
- e. Pembentukan kemandirian dan pemberdayaan untuk mencapai keunggulan
- f. Penciptaan iklim yang kondusif untuk tumbuhnya toleransi dan konsensus dalam kemajemukan
- g. Perencanaan terpadu secara horizontal (antarsektor) dan vertikal (antar jenjang – *bottom up* dan *top down planning*)
- h. Pendidikan berorientasi pada peserta didik
- i. Pendidikan multikultural
- j. Pendidikan dengan perspektif global

**2. Elemen Paradigma Desentralisasi**

Proses desentralisasi pendidikan, sebagai bagian utama dari arah perubahan paradigma pendidikan, harus mewujudkan pranata sosial dan prasarana yang menjadi kunci keberhasilan proses desentralisasi pendidikan tersebut. Pranata sosial dan prasarana tersebut adalah penataan kebijakan kurikulum, biaya pendidikan nonpemerintah (masyarakat, dan pihak lainnya yang tidak mengikat), subsidi pemerintah, dan pengelolaan karier pengajar. Keempat hal tersebut, hendaknya diwujudkan dalam proses desentralisasi pendidikan.



Gambar 1.5  
Perubahan Paradigma Pendidikan Nasional

*a. Kebijakan tentang Kurikulum*

Pada dasarnya, pendidikan bukan hanya mempersiapkan tenaga kerja siap pakai, melainkan pengembangan misi yang jauh lebih besar. Kurikulum dalam hal ini merupakan infrastruktur pelaksanaan misi tersebut. Peserta didik yang dihasilkan haruslah berakhlak, bermoral, dan memiliki kepribadian yang baik, siap membangun jati diri bangsa, dan menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Terkait dengan karakter yang akan dihasilkan, kualitas karakter yang diterima, dan dibutuhkan di masing-masing daerah berbeda. Dalam hal ini, kebijakan muatan lokal dalam kurikulum dibutuhkan. Contoh, peserta didik di Papua perlu memahami sejarah bangsa Indonesia dan masyarakat Papua sejak zaman kolonial Belanda. Selain itu, seni dan budaya berbagai suku di Papua juga perlu diperkenalkan dalam kelas.

Perdebatan tentang komponen nasional dan lokal di kurikulum pendidikan Indonesia juga terjadi. Fokus perdebatannya adalah berapa porsi komponen lokal dan komponen nasional. Hal ini juga terjadi di berbagai negara lain.

*b. Pembiayaan Nonpemerintah*

Selama ini, sumber pembiayaan pendidikan yang berasal dari masyarakat merupakan bagian terkecil dari keseluruhan struktur sumber pembiayaan pendidikan di Indonesia. Pada tahun anggaran 1997/1998, 11,78% dana penyelenggaraan perguruan tinggi negeri di Indonesia berasal dari mahasiswa dan orang tua, 10,59% berasal dari program kolaboratif dan sumber-sumber lain yang diperoleh Perguruan Tinggi, sedangkan 77,63% berasal dari pemerintah (Ditjen Dikti, 1999). Sumber pembiayaan dari masyarakat akan menjadi komponen yang sangat menentukan penyelenggaraan pendidikan baik swasta maupun negeri. Kemampuan ekonomi masyarakat yang menguat dan kesadaran akan pentingnya pendidikan yang meningkat, akan menentukan keberhasilan program pendidikan.

Pembiayaan pendidikan harus menjadi faktor pendorong pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Dengan menghubungkan keberhasilan pendidikan dengan kemajuan masyarakat daerah, sumbangan, dan kontribusi masyarakat dan pemerintah daerah dapat dikaitkan langsung dengan tingkat kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Ini berarti peranan pembiayaan pendidikan nonpemerintah amat penting untuk mempercepat perubahan kemajuan masyarakat daerah tersebut.

c. *Subsidi Pendidikan Pemerintah*

Berdasarkan kamus wikipedia, ‘subsidi’ dapat dijelaskan sebagai berikut:

*In economics, a subsidy (also known as a subvention) is a form of financial assistance paid to a business or economic sector. A subsidy can be used to support businesses that might otherwise fail, or to encourage activities that would otherwise not take place. (Wikipedia Dictionary).*

Dalam konteks makroekonomi, subsidi merupakan salah satu bentuk instrumen fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Meskipun terdapat kebijakan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam membiayai pendidikan, pemerintah tetap berkewajiban untuk memberikan subsidi terhadap penyelenggaraan pendidikan nasional. Subsidi ini ditujukan ke seluruh jenjang pendidikan di seluruh daerah di Indonesia.

Dengan porsi anggaran 20% untuk pendidikan, Pemerintah Pusat dengan APBNnya akan mampu mengkondisikan proses belajar mengajar di setiap kelas di daerah melalui penyediaan sarana dan prasarana. Contohnya adalah penyediaan Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas) sebagai fasilitas *database* ilmu pengetahuan di setiap sekolah.

d. *Pengelolaan Karier Tenaga Pengajar*

Dalam desentralisasi pendidikan, pengelolaan guru dan tenaga pengajar lainnya juga menjadi urusan daerah. Pengelolaan ini termasuk proses rekrutmen, penugasan, pengembangan bahkan sampai pengaturan pensiun. Pengelolaan ini termasuk aspek administratif dan aspek keahlian profesional. Hal ini diperlukan dalam pembuatan peraturan yang terkait untuk mendukung proses pengelolaan tersebut.

Sebagai refleksi, Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi dalam angka ketidakhadiran guru. Di level SD, angka ketidakhadiran guru mencapai 19%. Gaji rendah juga disebut sebagai salah satu alasan buruknya kinerja. Menurut data *World Education Indicator* (WEI), gaji awal guru SD di Indonesia kira-kira hanya 1/25 gaji guru di negara-negara maju, 1/10 gaji guru di Malaysia dan Filipina, 1/6 gaji di Thailand dan 1/3 gaji dari Sri Lanka dan 1/27 gaji guru di negara maju (lihat tabel 1.4). Di Asia Pasifik, data WEI tahun 1992 menyebutkan, kualitas pendidikan di Indonesia menduduki peringkat ke-10 dari 14 negara, dan kualitas guru ke-14 dari 14 negara berkembang. (Kompas, 10 Desember 2007).

Tabel 1.4  
Perbandingan Gaji Guru (dalam dollar AS)

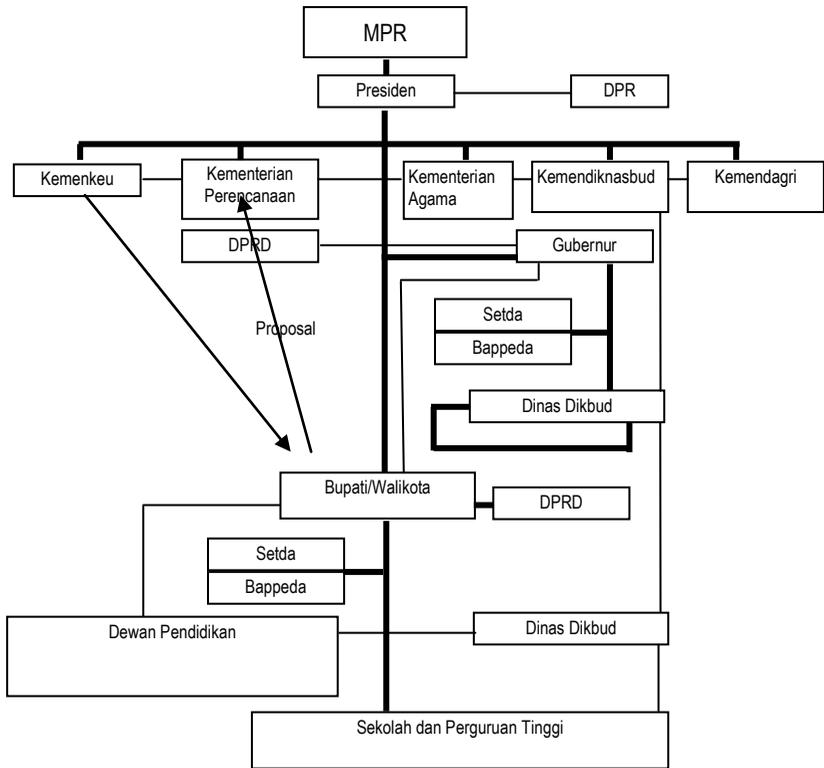
Negara	Tahun	SD		SMP		SMA	
		Gaji awal	Gaji tertinggi	Gaji awal	Gaji tertinggi	Gaji awal	Gaji tertinggi
Cile	2003	11.709	18.437	11.709	18.473	11.709	19.302
Mesir	2002/3	1.046	-	1.046	-	-	-
<b>Indonesia</b>	<b>2002/3</b>	<b>1.002</b>	<b>3.022</b>	<b>1.002</b>	<b>3.022</b>	<b>1.042</b>	<b>3.022</b>
Malaysia	2002	9.230	17.470	13.480	29.151	13.480	29.151
Paraguay	2002	7.950	7.950	12.400	12.400	12.400	12.400
Filipina	2002/3	9.890	11.756	9.890	11.756	9.890	11.765
Sri Lanka	2002	3.100	3.945	3.100	4.509	3.945	5.073
Thailand	2003/4	6.048	28.345	6.048	28.345	6.048	28.345
Uruguay	2002	4.850	7.017	4.850	7.017	5.278	7.444
OECD	2003	24.287	40.539	26.241	43.477	27.455	45.948

Sumber: Unesco-UIS/OECD 2005 Education Trends in Perspective: Analysis of the World Education Indicators - Kompas, 10 Desember 2007

Dari data di atas, proses ketidakmerataan kesejahteraan guru dan kompetensi guru terjadi. Hal ini akan mengakibatkan perbedaan kualitas proses belajar mengajar yang terjadi dalam satu sekolah maupun sekolah yang berbeda. Untuk mengatasi hal ini, proses sertifikasi guru dimunculkan. Sertifikasi guru ini akan menghasilkan *database* kompetensi guru sesuai dengan bidangnya masing-masing di setiap daerah. Sehingga pengambilan kebijakan tentang guru dapat dilakukan secara tepat sasaran.

### 3. Model Desentralisasi Pengelolaan Pendidikan Daerah

Dalam model pengembangan model ini, pendidikan diserahkan kepada kabupaten/kota dan dikelola oleh instansi yang menangani pendidikan (dan kebudayaan). Implikasi dari model ini adalah kewenangan yang lebih besar diberikan ke kabupaten/kota untuk mengelola pendidikan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya, perubahan kelembagaan untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan dan pelaksanaan unit-unit kerja di daerah, kepegawaian yang menyangkut profesionalisme, dan perubahan penanganan anggaran pembangunan pendidikan yang dikelola langsung dari Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Perencanaan Nasional ke pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk *block grant*; sehingga kekakuan dan pengkotakan dihilangkan dalam penanganan anggaran. Anggaran rutin pendidikan (BOP) diberikan langsung ke sekolah.



Sumber: Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, 2001 (modifikasi)

Gambar 1.6  
Model Desentralisasi Pendidikan

Kondisi ini telah diatur dalam UU no 22/1999, dan kemudian diperkuat dalam UU no 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bersama Undang-Undang Sisdiknas, dua perundangan di atas menjadi dasar pelaksanaan desentralisasi pendidikan di Indonesia.

Tabel 1.5  
Tanggung Jawab Kelembagaan

<b>Di Pemerintahan Pusat</b>	Mendiknas sebagai administrator dibantu oleh Sekretariat Jendral, Direktur Jendral, Inspektur jendral, dan kepala Balitbang Diknas yang berperan sebagai penentu kebijakan dan strategi serta penanggung jawab tertinggi dalam pengelolaan sistem pendidikan nasional secara menyeluruh.
<b>Di Pemerintahan Provinsi</b>	Dinas Pendidikan di provinsi: <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Bertugas melaksanakan urusan desentralisasi dan dekonsentrasi dari departemen yang bersangkutan,</li> <li>(2) Mengakomodasikan dan menjabarkan kebijakan yang telah digariskan oleh departemen yang bersangkutan dan memberikan pertimbangan kepada Gubernur,</li> <li>(3) Khusus untuk bidang pendidikan (dan kebudayaan), Dinas Diknas di provinsi bertindak sebagai regulator yang mempunyai peran pokok untuk menjabarkan kebijaksanaan dan strategi yang telah digariskan oleh administrator (pusat), seperti mengeluarkan peraturan, perizinan, serta mengendalikannya.</li> </ol>
<b>Di Pemerintahan Kabupaten/Kota</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Unsur pelaksanaan teknis urusan rumah tangga daerah dan urusan dekonsentrasi dari Dinas Diknas di Provinsi,</li> <li>(2) Sebagai operator yang mengelola lembaga-lembaga dan departemen yang bersangkutan, misalnya untuk Kemendiknasbud, lembaga pendidikan memberikan fasilitas pendidikan, tenaga pendidik dan sumber daya yang terkait dengan proses belajar mengajar (PBM),</li> <li>(3) Mengkoordinasikan materi pendidikan dan sebagai pengendali mutu pendidikan.</li> </ol>
<b>Dewan Pendidikan (DP)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Terdiri dari dunia usaha, orang tua, tokoh masyarakat, unsur perguruan tinggi, LSM, dan lain-lain.</li> <li>(2) Sebagai unsur peneliti dan memberikan pertimbangan terhadap tugas Dinas Diknas di kab/kota,</li> <li>(3) Memberikan pertimbangan kepada bupati/walikota perihal mutu pendidikan.</li> </ol>
<b>Unit Pelaksana Teknis</b>	Unit Pelaksana Teknis baik sekolah maupun perguruan tinggi mempunyai: <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Seksi Sarana Pendidikan – mengurus sarana dan prasarana pendidikan</li> <li>(2) Sekretariat – menangani perencanaan, urusan umum, kepegawaian dan keuangan</li> <li>(3) Tenaga fungsional – melakukan pemantauan, penilaian, pengendalian, bimbingan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kebudayaan. Jabatan ini diatur dengan peraturan perundang-undangan</li> </ol>

Sumber: Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, 2001 (dengan modifikasi)

Pengaturan hak dan tanggung jawab masing-masing lembaga di pelbagai pemerintahan merupakan turunan dari kebijakan desentralisasi. Kondisi ini menyebabkan tugas, pokok, dan fungsi dari masing-masing lembaga tersebut menjadi berbeda di masa desentralisasi. Kementerian Pendidikan dan Budaya di Pemerintah Pusat yang menjadi pelaksana, saat ini cenderung menjadi koordinator dan regulator. Demikian juga dengan Dinas Pendidikan Nasional di Provinsi. Hal ini berbeda di Dinas Pendidikan di Kota/ Kabupaten. Unit Pelaksana Teknis pendidikan sekolah menjadi pelaksana sepenuhnya proses

desentralisasi dengan Dinas Pendidikan Nasional – Kota/Kabupaten sebagai koordinator lapangan.

## **F. PERUBAHAN PARADIGMA MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN**

Manajemen keuangan pendidikan dapat didefinisikan sebagai:

1. Seni dan ilmu mengelola sumber daya keuangan pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Seni dan ilmu mengelola sumber daya keuangan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.
3. Proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya keuangan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

Dari ketiga definisi manajemen keuangan pendidikan, definisi pertama lebih bersifat teknis didaktif, definisi kedua lebih bersifat administratif edukatif, dan definisi ketiga lebih bersifat proses dalam pengambilan kebijakan publik (*public decision-making process*) pada level birokrasi, khususnya birokrat pengambil kebijakan yang mengurus pengelolaan keuangan pendidikan yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan Nasional dan Budaya, dan Dinas Pendidikan.

### **1. Pandangan dalam Manajemen Keuangan Pendidikan**

Untuk mengkaji lebih dalam tentang manajemen keuangan pendidikan:

- a. *Manajemen keuangan sebagai suatu sistem*  
Manajemen keuangan pendidikan dipandang sebagai suatu kerangka kerja yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan yang diarahkan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi pendidikan.
- b. *Manajemen keuangan sebagai suatu proses*  
Manajemen keuangan pendidikan sebagai rangkaian tahapan kegiatan yang diarahkan pada pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber daya keuangan yang tersedia.

c. *Manajemen keuangan sebagai proses pemecahan masalah*

Proses manajemen keuangan dalam praktiknya dapat dikaji dari proses pemecahan masalah yang dilaksanakan oleh semua bagian/komponen yang ada dalam organisasi pendidikan.

Secara konkrit, tahapan dalam organisasi pelayanan pendidikan, seperti yang dilakukan di Dinas Pendidikan adalah:

1. identifikasi masalah,
2. perumusan masalah,
3. dilanjutkan dengan langkah-langkah pemecahan masalah.

Melalui tahapan tersebut diharapkan tercapai hasil kegiatan secara efektif dan efisien. Dari beberapa pandangan di atas, dapat disimpulkan ada dua alasan mendasar mengapa perencanaan dalam manajemen keuangan pendidikan diperlukan, yaitu :

- 1) Untuk mencapai ketuntasan Wajar (Wajib Belajar) 9 tahun, manajemen keuangan pendidikan dibutuhkan sebagai kerangka kerjasama untuk mencapai Angka Partisipasi Kasar (APK) sebesar 95% dan juga tujuan institusi pelayanan pendidikan itu sendiri.
- 2) Untuk menyukseskan ketuntasan Wajar 9 Tahun, manajemen keuangan pendidikan diperlukan sebagai proses pemecahan masalah yang dihadapi dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan.

## **2. Tujuan dan Manfaat Manajemen Keuangan Pendidikan**

Tujuan dan manfaat manajemen keuangan pendidikan adalah:

- a. Mengetahui permasalahan dalam rangka percepatan penuntasan Wajar 9 tahun,
- b. Menyusun rencana dan merumuskan tujuan,
- c. Mengidentifikasi kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman dalam perencanaan,
- d. Sebagai acuan dalam penetapan anggaran pendidikan,
- e. Sebagai alat pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan khususnya dalam percepatan Wajar 9 tahun

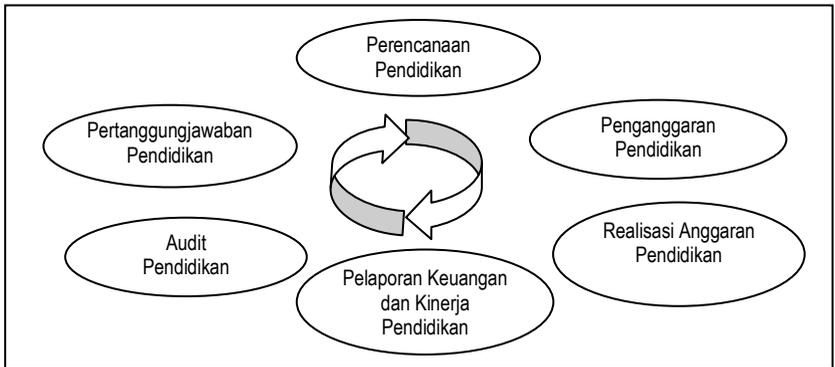
## **3. Siklus Manajemen Keuangan Pendidikan**

Manajemen keuangan pendidikan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan dalam organisasi pendidikan. Sedangkan fungsi keuangan adalah kegiatan utama yang harus dilakukan oleh pejabat yang bertanggung

jawab dalam bidang keuangan pendidikan. Fungsi manajemen keuangan pendidikan adalah menggunakan dana dan menempatkan dana pendidikan.

Manajemen keuangan pendidikan terbagi dalam tiga kelompok yaitu :

1. Kelompok manajemen pelaksana (*operational finance management*), meliputi para eksekutif keuangan.
2. Kelompok manajemen pengawas (*finance supervisor management*) meliputi audit internal dan analisis keuangan.
3. Kelompok manajemen eksekutif adalah penanggung jawab fungsi yang terkait dengan keuangan, pemasaran, pembelanjaan, produksi, pembiayaan, akuntansi, kepegawaian, dan pelatihan.



**Gambar 1.7**  
Siklus Manajemen Keuangan Pendidikan

Manajemen memiliki tiga tahapan penting yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ketiga tahap tadi apabila diterapkan dalam manajemen keuangan dapat dipilah dalam perencanaan pendidikan, penganggaran pendidikan, realisasi anggaran pendidikan, pelaporan keuangan dan kinerja pendidikan, audit pendidikan dan pertanggungjawaban pendidikan (lihat gambar 1.7). Semua tahap itu akan dibahas secara khusus dalam bab-bab di buku ini.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan arah pandangan pendidikan di Indonesia!
- 2) Jelaskan realita pendidikan di Indonesia!
- 3) Jelaskan implikasi hasil pembangunan terhadap sektor pendidikan!
- 4) Jelaskan perubahan paradigma manajemen keuangan pendidikan!

### *Petunjuk jawaban latihan*

- 1) Baca Kegiatan Belajar III Modul 1 pada bagian arah pandangan pendidikan Indonesia (Arah pandangan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia mengarah pada sepuluh nilai kemasyarakatan sebagai berikut: Kesetaraan, Wahana pemberdayaan bangsa, Pemberdayaan masyarakat, Kemandirian dan pemerataan, Toleransi dan konsensus, Perencanaan Pendidikan, Rekonstruksi, Orientasi peserta didik, Pendidikan multikultural, dan Prinsip global.)
- 2) Baca Kegiatan Belajar III Modul 1 pada bagian Realita Pendidikan di Indonesia (Realita pendidikan di Indonesia mengalami kemunduran, beberapa gejala yang menunjukkan mundurnya dunia pendidikan dapat terlihat pada indikasi disparitas antarwilayah. Hanya 41% anak usia SMP di Papua bersekolah, sementara di DIY 77%. Untuk SD, Papua 80%, sementara di Kalimantan Tengah 95%. Untuk SMA hanya 20% anak usia SMA di Sulawesi Barat sekolah, sedangkan di DIY 62%. Ini berarti, masih jauh dari target *pendidikan untuk semua*.)
- 3) Baca Kegiatan Belajar III Modul 1 pada bagian Implikasi Hasil Pembangunan terhadap Sektor Pendidikan (Implikasi hasil pembangunan terhadap sektor pendidikan per Orde selama ini bermuara pada krisis ekonomi. Dampak krisis ekonomi dalam dunia pendidikan adalah menurunnya kemampuan masyarakat dalam membayar biaya pendidikan, meningkatnya pengangguran termasuk pengangguran terdidik, berkurangnya kepekaan sosial, pertikaian antarkelompok, dan migrasi termasuk anak usia sekolah. Hal ini terjadi pada Orde Lama maupun Orde Baru.)

- 4) Baca Kegiatan Belajar III Modul 1 pada bagian Perubahan Paradigma Manajemen Keuangan Pendidikan (perubahan paradigma manajemen keuangan pendidikan, berikut berbagai aspek yang berubah akibat perubahan paradigma pendidikan:

Keterangan	Paradigma Lama	Paradigma Baru
Orientasi kebijakan	Sentralistik	Desentralistik
Arah kebijakan	Kebijakan yang <i>top down</i>	Kebijakan yang <i>bottom up</i>
Fokus	Orientasi pengembangan parsial: pendidikan untuk pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan teknologi perakitan	Orientasi pengembangan holistik: pendidikan untuk pengembangan kesadaran untuk bersatu dalam kemajemukan budaya, menjunjung tinggi nilai moral, kemanusiaan, agama, kesadaran kreatif, produktif, dan kesadaran hukum
Peranan pemerintah dan masyarakat	Peran pemerintah sangat dominan	Meningkatkan peran serta masyarakat secara kualitatif dan kuantitatif
<i>Stakeholders</i>	Lemahnya peran institusi nonsekolah	Pemberdayaan institusi masyarakat, keluarga, LSM, pesantren, dan dunia usaha



## RANGKUMAN

Arah pandangan pendidikan di Indonesia: 1) kesetaraan, 2) wahana pemberdayaan bangsa, 3) pemberdayaan masyarakat, 4) kemandirian dan pemerataan, 5) toleransi dan konsensus, 6) perencanaan pendidikan, 7) rekonstruksi, 8) orientasi peserta didik, 9) pendidikan multikultural, dan 10) prinsip global. Jika penyelenggaraan pendidikan Indonesia diteliti lebih mendalam, ideologi yang digunakan mengarah ke ideologi konservatif dan turunannya.

Sektor pendidikan di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup besar selama dua dekade. Kualitas pendidikan di Indonesia merupakan yang terburuk di antara 12 negara Asia, yang juga menempatkan Indonesia di urutan paling bawah di antara negara-negara ASEAN. Peringkat *Human Development Index* (HDI) Indonesia memang membaik dalam beberapa tahun terakhir, tetapi masih jauh di bawah peringkat tahun 1977 (urutan ke-99) yakni urutan 102 (tahun 2002), 110 (tahun 2005), dan 107 (tahun 2012). Beberapa pertanyaan harus dijawab

sebagai instropeksi diri dalam pengelolaan sektor pendidikan selama ini. Beberapa gejala yang menunjukkan mundurnya dunia pendidikan dapat terlihat pada indikasi disparitas antarwilayah.

Hasil pembangunan per Orde selama ini ternyata bermuara pada krisis ekonomi. Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kinerja sektor pendidikan di daerah melalui pemberdayaan kemampuan lokal, meningkatkan peran serta masyarakat, terjaminnya pemerataan pendidikan, dan meningkatkan mutu pendidikan.

Pendidikan seharusnya menjadi kepedulian semua komponen bangsa karena kualitas masa depan manusia sangat tergantung pada pendidikannya. UU no 22 tahun 1999 waktu itu adalah bahwa daerah berkewajiban menangani pendidikan. Desentralisasi di bidang pendidikan telah menjadi salah satu agenda utama pemerintah, dan tentunya dengan segala konsekuensi logis diterapkannya kebijakan tersebut. Desentralisasi pendidikan dapat diartikan sebagai penyerahan otoritas bidang pendidikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menurut aturan yang berlaku.

Proses desentralisasi pendidikan, sebagai bagian utama dari arah perubahan paradigma pendidikan harus mewujudkan pranata sosial dan prasarana yang menjadi kunci keberhasilan proses desentralisasi pendidikan. Pendidikan bukan hanya mempersiapkan tenaga kerja siap pakai, melainkan pengembanan misi yang jauh lebih besar. Sumber pembiayaan dari masyarakat akan menjadi komponen yang sangat menentukan penyelenggaraan pendidikan baik swasta maupun negeri. Pembiayaan pendidikan harus menjadi faktor pendorong pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Dalam konteks makroekonomi, subsidi merupakan salah satu bentuk instrumen fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah. Subsidi ini ditujukan ke seluruh jenjang pendidikan di seluruh daerah di Indonesia. Dengan porsi anggaran 20% untuk pendidikan, Pemerintah Pusat dengan APBNnya akan mampu mengkondisikan proses belajar mengajar di setiap kelas di daerah melalui penyediaan sarana dan prasarana. Dalam desentralisasi pendidikan, pengelolaan guru, dan tenaga pengajar lainnya juga menjadi urusan daerah. Indonesia merupakan salah satu negara yang tertinggi dalam angka ketidakhadiran guru. Sertifikasi guru ini akan menghasilkan *database* kompetensi guru sesuai dengan bidangnya masing-masing di setiap daerah.

Pendidikan diserahkan kepada kabupaten/kota dan dikelola oleh instansi yang menangani pendidikan. Dasar pelaksanaan desentralisasi pendidikan di Indonesia yaitu UU no 22 tahun 199 dan UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Pengaturan hak dan tanggung jawab

masing-masing lembaga di pelbagai pemerintahan merupakan turunan dari kebijakan desentralisasi.

Tiga tahapan penting manajemen yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan penelitian.



### TES FORMATIF 3

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Arah pandangan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia ini mengarah pada sepuluh nilai kemasyarakatan, sebagai berikut, *kecuali* ...
  - A. Wahana pemberdayaan bangsa
  - B. Pemberdayaan sumber daya manusia
  - C. Kemandirian dan kesetaraan
  - D. Perencanaan pendidikan
  
- 2) Perubahan paradigma pendidikan yang telah terjadi, dapat disebutkan, antara lain, *kecuali* ...
  - A. Paradigma proses pendidikan yang berorientasi kepada guru/dosen/lembaga bergeser ke sistem yang berorientasi kepada peserta didik
  - B. Penentuan mutu (kualitas) pendidikan dilakukan melalui proses perbandingan (akreditasi) dengan standar internasional (*world class level*)
  - C. Semakin populernya pendidikan seumur hidup, menyebabkan pendidikan formal dan informal mengalami perubahan proses dan orientasi pelayanan
  - D. Batas pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah menjadi semakin membantu melalui proses sertifikasi
  
- 3) Perubahan kebijakan sampai dengan saat ini belum diikuti dengan peningkatan mutu keluaran pendidikan dasar dan menengah maupun pendidikan tinggi. Hal ini diakibatkan oleh...
  - A. Kurikulum dalam arti revisi yang menjamin relevansi, efisiensi, efektivitas, dan produktivitas pembentukan kompetensi.
  - B. Belum terpenuhinya tuntutan akan kemampuan profesionalisme guru-guru baik dilihat dari kompetensi, kualifikasi pendidikan, maupun status sosial dan ekonomi profesi guru

- C. Kapasitas manajemen sekolah dan perguruan tinggi yang diperkuat melalui implementasi manajemen berbasis sekolah dan Badan Layanan Umum.
  - D. Kapasitas keuangan sekolah dan perguruan tinggi yang diperkuat melalui kegiatan inovatif pengabdian masyarakat.
- 4) Diperlukan langkah-langkah konkret berikut dalam memperkuat mutu pendidikan dasar dan menengah serta tinggi, *kecuali* ...
- A. Memperkuat kurikulum dalam arti revisi yang menjamin relevansi, efisiensi, efektivitas, dan produktivitas pembentukan kompetensi.
  - B. Belum terpenuhinya tuntutan akan kemampuan profesionalisme guru-guru baik dilihat dari kompetensi, kualifikasi pendidikan, maupun status sosial dan ekonomi profesi guru.
  - C. Memperkuat kapasitas manajemen sekolah dan perguruan tinggi melalui implementasi manajemen berbasis sekolah dan Badan Layanan Umum.
  - D. Memperkuat kapasitas keuangan sekolah dan perguruan tinggi melalui kegiatan inovatif pengabdian masyarakat.

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

## Kunci Jawaban Tes Formatif

### *Tes Formatif 1*

- 1) B
- 2) B
- 3) C
- 4) A

### *Tes Formatif 2*

- 1) B
- 2) B
- 3) C
- 4) A

### *Tes Formatif 3*

- 1) B
- 2) D
- 3) B
- 4) B

## Daftar Pustaka

- Astiz, M.F., Wiseman, A.W. and Baker, D.P. (2002). *Slouching towards Decentralization: Consequences of Globalization for Curricular Control in National Education Systems*. *Comparative Education Review*, vol. 1, no. 1, 66-86.
- Fasli, Jalal & Supriadi Dedi. (2001). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: AdiCita
- Fakih, Mansour. (2001). “*Ideologi dalam Pendidikan : sebuah pengantar*”, dalam William F. O’neil, *Ideologi-ideologi Pendidikan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Fiala, Robert, and Audri Gordon-Lanford. (1987). “*Educational Ideology and the World Educational Revolution, 1950–1970.*” *Comparative Education Review* 31 (3): 315–32.
- Grundy, Shirley. (1987). *Curriculum: Product Or Praxis*. Routledge.
- Hanson, E.M (1998). *Educational Reform and Administrative Development : The Case of Columbia and Venezuela*, Stanford : Hoover Institution Press Stanfor Univercity.
- Hanson, E.M. (2000, October). Educational Decentralization Around the Pacific Rim. *Journal of Educational Administration*, Vol. 38, No. 5.
- Heywood, A. (2007) *Political Ideologies: An introduction*, Basingstoke: Palgrave Macmillan
- Jepperson, Ronald L. 2002. “*The Development and Application of Sociological Neoinstitutionalism.*” Pp. 229-266 in *New Directions in Contemporary Sociological Theory*, edited by J. Berger & M. Zelditch, Jr. Lanham, MD: Rowman & Littlefield
- Mannheim, Karl. (1959). *System sociologi : An introductio to the study of society*. London : Routledge & Kegan Paul Ltd
- McNeely, Connie. (1995). *Constructing the Nation-State: International Organization and Prescriptive Action*. Westport, Conn.: Greenwood.

Meighan, R. & Harber, C. (2007) *A sociology of educating* (ed.). London: Continuum

Meyer, John W., John Boli, George M. Thomas, and Francisco O. Ramirez. (1997). "World Society and the Nation-State." *American Journal of Sociology* 103: 144-81.

Paqueo V. and Lammert J. (2000). *Decentralization & School-Based Management Resource Kit*. World Bank.

Ramirez, Francisco O. (1987). "Global Changes, World Myths, and the Demise of Cultural Gender." Pp. 257–73 in *America's Changing Role in the World-System*, edited by Terry Boswell and Albert J. Bergesen. New York: Praeger

Lawrence stenhouse, (1975). *An introduction to curriculum research and development* London : Heinemann.

Wong, Suk-Ying. (1991). "The Evolution of Social Science Instruction, 1900–86." *Sociology of Education* 64 (1): 33–47.